
**Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
Kabupaten Bandung Barat**

Alya Tiara Alvioni¹; Darto²; Bonti³

Department Of Public Administration, Faculty Of Social And Political Sciences,

¹alyatiaraalv@Gmail.Com

ABSTRACT

OPENNESS OF PUBLIC INFORMATION HAS AN IMPORTANT ROLE IN REALIZING GOOD GOVERNANCE, GIVING PEOPLE RIGHTS TO KNOW THE ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE GOVERNMENT, PROVIDING A SUPERVISORY FUNCTION, AND A FORM OF DEMOCRACY. HOWEVER, IN ITS IMPLEMENTATION THERE ARE STILL SOME PROBLEMS BY THE THE INFORMATION COMMUNICATIONS AND STATISTICS OFFICE OF WEST BANDUNG REGENCY, SUCH AS THE CLASSIFICATION OF WEST BANDUNG REGENCY IN THE CLASS AS LESS INFORMATIVE, THE PPID HAS NOT BEEN ESTABLISHED AND THE PPID WEBSITE IS NOT ACTIVE, AND OTHERS. THE PURPOSE OF THE RESEARCH THAT THE AUTHOR DID WAS TO DESCRIBE THE DISCLOSURE OF PUBLIC INFORMATION CARRIED OUT BY THE INFORMATION COMMUNICATIONS AND STATISTICS OFFICE OF WEST BANDUNG REGENCY. THE RESEARCH METHOD THAT THE AUTHOR USES IN THIS STUDY IS A DESCRIPTIVE RESEARCH METHOD WITH A QUALITATIVE APPROACH. THE ANALYSIS WAS CARRIED OUT BY DESCRIBING TRANSPARENCY AT THE INFORMATION COMMUNICATIONS AND STATISTICS OFFICE OF WEST BANDUNG REGENCY USING THE TRANSPARENCY PRINCIPLES MODEL STATED BY RICHARD W OLIVER (2004). THE RESULTS OF THE STUDY INDICATE THAT PUBLIC INFORMATION BY THE INFORMATION COMMUNICATIONS AND STATISTICS OFFICE OF WEST BANDUNG REGENCY HAS NOT GONE WELL. THIS IS BECAUSE THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE REGULATED POLICIES AND THE EXISTING STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP), AS WELL AS THE ASPECTS OF THE TRANSPARENCY PRINCIPLE MODEL STATED BY RICHARD W OLIVER (2004) TO ACHIEVE TRANSPARENCY.

KEYWORDS: *OPENNESS OF PUBLIC INFORMATION, TRANSPARENCY, E-GOVERNMENT*

ABSTRAK

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MEMILIKI PERAN PENTING UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*, MEMBERIKAN HAK-HAK MASYARAKAT UNTUK MENGETAHUI KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH, MEMBERIKAN FUNGSI PENGAWASAN, DAN BENTUK DEMOKRASI. NAMUN DALAM PELAKSANAANNYA MASIH TERDAPAT BEBERAPA PERMASALAHAN OLEH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANDUNG BARAT, SEPERTI TERGOLONGNYA KABUPATEN BANDUNG BARAT DI KELAS KURANG INFORMATIF, BELUM DIBENTUKNYA PPID DAN TIDAK AKTIFNYA WEBSITE PPID, DAN LAINNYA. TUJUAN DARI PENELITIAN YANG PENULIS LAKUKAN ADALAH UNTUK MENDESKRIPSIKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK YANG DILAKUKAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANDUNG BARAT. METODE PENELITIAN YANG PENULIS GUNAKAN DALAM PENELITIAN INI ADALAH METODE PENELITIAN DESKRIPTIF DENGAN PENDEKATAN KUALITATIF. ANALISIS DILAKUKAN DENGAN MENDESKRIPSIKAN TAHAPAN TRANSPARANSI DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANDUNG BARAT MENGGUNAKAN *TRANSPARENCY PRINCIPLES MODEL* YANG DINYATAKAN OLEH RICHARD W OLIVER (2004). HASIL PENELITIAN MENUNJUKKAN BAHWA KETERBUKAAN INFORASI PUBLIK OLEH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANDUNG BARAT BELUM BERJALAN DENGAN BAIK. HAL INI DIKARENAKAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK YANG BELUM SESUAI DENGAN KEBIJAKAN YANG MENGATUR DAN *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP) YANG ADA, JUGA BELUM TERPENUHINYA ASPEK-ASPEK *TRANSPARENCY PRINCIPLES MODEL* YANG DINYATAKAN OLEH RICHARD W OLIVER (2004) UNTUK DAPAT TERCAPAINYA TRANSPARANSI.

KATA KUNCI: *KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, TRANSPARANSI, E-GOVERNMENT*

PENDAHULUAN

Transparansi pemerintah melalui keterbukaan informasi publik adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencapai *good governance*. Reformasi dalam pelayanan dan pemberian informasi publik dengan pemanfaatan *e-government* seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk mereformasi lahan publik menjadi lebih efektif, terbuka, dan berfokus pada keterbukaan akses bagi masyarakat. Semakin terbukanya dewan publik serta semakin tingginya kualitas sistem yang dirasakan dari transparansi informasi dan *e-government*, maka semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang menyediakan sistem, hal tersebut yang membuat semakin pentingnya transparansi keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik juga memberikan hak-hak masyarakat untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, memberikan fungsi pengawasan, dan memiliki peran penting sebagai bentuk demokrasi. Untuk mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut disahkanlah kebijakan yang mengatur yakni Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pentingnya transparansi informasi publik terhadap publik yang harus disadari oleh masyarakat ialah keterbukaan informasi publik merupakan bentuk demokrasi sebagai hak warga negara. Partisipasi masyarakat dalam urusan publik pada negara demokratis tidak hanya terbatas pada hak pilih, tapi juga partisipasi dalam pengawasan tercapainya akuntabilitas. Keterbukaan informasi adalah hasil dari informasi yang tersedia dan diolah dengan baik. Transparansi dapat tercapai jika adanya partisipasi dari seluruh *stakeholder* dan akuntabilitas yang selaras

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat merupakan badan yang bertanggung jawab pada keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bandung Barat. Saat ini keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Bandung Barat belum berlangsung dengan maksimal sesuai harapan karena masih kurangnya transparansi, lalu berdasarkan laporan Komisi Informasi Tahun 2020, hasil akhir penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Kabupaten Bandung Barat tergolong di kelas kurang informatif, dan menempati peringkat 24 dari 25 Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kurangnya keterbukaan juga dapat dilihat dari *Website* PPID Kabupaten Bandung

Barat sudah tidak aktif sejak tahun 2018, Belum adanya LLID (Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi), dan kurangnya partisipasi masyarakat karena sosialisasi yang minim. Padahal keterlibatan masyarakat dalam keingintahuan mengetahui informasi publik juga menunjukkan partisipasi masyarakat yang aktif. Akuntabilitas dari badan publik sebagai pertanggung jawaban merupakan hal yang sangat penting terhadap seluruh *stakeholder*, baik itu masyarakat perorangan, berkelompok, maupun badan publik lain yang memiliki hak untuk mengetahui informasi publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana keterbukaan informasi publik hingga mencapai pelaksanaan *good governance* dengan transparansi sebagai upaya meningkatkan partisipasi, memberikan hak, dan meningkatkan pengawasan publik. Karena itu penulis bermaksud meneliti Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggali atau mengungkap informasi lebih mendalam. Metode penelitian kualitatif ini relevan pada penelitian ini karena penulis ingin mendeskripsikan mendeskripsikan tahapan transparansi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan tahapan transparansi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat menggunakan *Transparency Principles Model* yang dinyatakan oleh Richard W Oliver (2004). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan yang memiliki informasi, peran, serta keterlibatan yang telah ditetapkan penulis sebagai data primer, dan studi dokumentasi, studi kepustakaan sebagai data sekunder. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dan dilakukannya triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data.

PENELITIAN TERKAIT

A. Governance

Pendekatan administrasi publik menampilkan pemerintah yang berfungsi bukan sebagai satu-satunya pusat kekuasaan negara melainkan sebagai salah satu organisasi yang bertindak sejalan dengan demokrasi. *Governance* merupakan suatu konsep yang lebih luas dari pemerintah, *governance* berfungsi untuk menjalankan seluruh wewenang untuk memelihara ketertiban dan memenuhi kebutuhan publik, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, serta berfokus pada sinergisitas kerja sama dari tata kelola dari tiga set aktor penting yaitu pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Definisi pemerintahan (*Governance*) dinyatakan oleh Francis Fukuyama (2013), yaitu:

"I define governance as a government's ability to make and enforce rules, and to deliver services, regardless of whether that government is democratic or not." (Fukuyama, 2013, p. 350)

Francis Fukuyama mengungkapkan pemerintahan sebagai kekuatan pemerintah untuk memformulasikan dan melaksanakan aturan, dan juga memberikan layanan publik, tanpa memedulikan apakah pemerintah tersebut tidak demokratis sekalipun. Pemerintahan diatur oleh pemerintah melalui kebijakan.

B. Good Governance

Good Governance umumnya mengacu pada karakteristik dari bagaimana seharusnya pemerintahan dijalankan sebaik-baiknya, dari segi kualitas kelembagaan dan tata kelola untuk pengembangan dan menerapkan langkah-langkah kebijakan yang efektif dan adil. Perkembangan pada ekspektasi masyarakat yang meningkat terhadap peran negara dan kapasitas fungsional pemerintah juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan kinerjanya untuk memenuhi kebutuhan publik, serta menjalin sinergisitas dengan aktor penting lainnya. Seperti definisi *good governance* yang dijelaskan oleh Michael Johnston (2006) sebagai:

"Good governance is a legitimate, accountable, and effective ways of obtaining and using public power and resources in the pursuit of widely-accepted social goals." (Johnston, 2002, p. 2)

Michael Johnston menjelaskan pemerintahan yang baik merupakan bentuk legal, bertanggung jawab, serta efektif untuk mendapatkan juga memanfaatkan kekuasaan dan sumber daya untuk dapat menyelesaikan masalah serta mencapai tujuan

masyarakat luas. Sumber daya publik yang dimaksud merupakan seluruh aktor yang memiliki pengaruh dalam tercapainya *good governance*.

C. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan atau transparansi merupakan bentuk nyata dari *good governance*, dapat dilihat dari faktor-faktor *good governance* yang didasarkan oleh transparansi, partisipasi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Keterbukaan informasi publik (*public information transparency*) berkaitan dengan segala informasi yang bersumber dari pemerintah, dapat diterima dengan akses yang mudah, dapat dimengerti, dan merupakan informasi yang valid. Transparansi diimplementasikan untuk dapat mencapai nilai-nilai utama terkait dengan demokrasi dan *good governance*. Transparansi atau keterbukaan sebagai bentuk implementasi *good governance* dijelaskan oleh Ben Worthy (2010) sebagai:

"Transparency could create a 'virtuous circle' of increased legitimacy, democratic participation and trust that could be the breakthrough that eventually brings about a dynamic change in the government, politics, and even 'shape' of a nation" (Worthy, 2010, pp. 562–563)

Ben Worthy menjelaskan bahwa transparansi dapat menciptakan 'lingkaran baik' dari peningkatan legitimasi, partisipasi demokrasi, dan kepercayaan yang dapat menjadi terobosan yang akan membawa perubahan dinamis dalam pemerintahan, politik, bahkan 'bentuk' suatu bangsa. Dalam hubungan untuk dapat membentuk 'lingkaran baik' tersebut, strategi komunikasi pemerintah harus bertujuan untuk menciptakan hubungan yang sinergis dengan masyarakat yang ingin berpartisipasi menerima informasi yang mereka butuhkan pada waktunya sehingga tercapainya *good governance*. Selanjutnya terdapat juga model atau faktor-faktor yang dinilai akan memengaruhi tercapainya tujuan dari implementasi keterbukaan informasi publik, menurut Oliver (Oliver, 2004, pp. 34–35), dengan *Transparency Principles Model* terdapat empat dimensi yang dapat memengaruhi keberhasilan transparansi, yaitu:

1. Komitmen kepemimpinan (*Leadership commitment*)

Pemimpin organisasi berkomitmen dan menanamkan komitmen transparansi ke dalam komunikasi organisasi dan seluruh aktor, dengan proses pengumpulan informasi, serta sistem metriknya. Komitmen ditunjukkan oleh standar yang dipegang, dokumentasi, dan

komunikasi proses serta metrik tata kelola, dan menjalankan pembicaraan dengan penegakan transparansi dan pedoman etika yang efektif dan efisien.

2. Proses formal (*Formalized processes*)
Transparansi membutuhkan informasi yang sering, banyak, dan akurat. Adanya tanggung jawab terformulasi berupa susunan dan laporan, adanya ketetapan informasi rutin yang diotomatisasi. Seluruh metrik yang terkait memiliki mekanisme laporan pemrosesan.
3. Program latihan (*Training programs*)
Komitmen *top-management* untuk meningkatkan transparansi ditingkatkan dengan pelatihan program yang komprehensif. Adanya program pelatihan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi yang didekodekan, secara akurat namun audiens nonteknis pun dapat memahaminya, *critical thinking* sumber daya manusia yang dikembangkan dan kemampuan untuk mengambil keputusan, adanya juga pemberian pengertian dan semangat komitmen hingga perilaku etis.
4. Komunikasi dengan seluruh aktor (*Communication with stakeholders*)
Transparansi mengharuskan keterbukaan yang aktif, salah satunya mengomunikasikan informasi secara tepat waktu dan mudah agar adanya *feedback* secara efisien. Komunikasi terbuka bersama seluruh aktor melibatkan fokus lebih dari sekadar angka, namun dibutuhkannya diskusi yang akurat dan dapat dimengerti untuk *feedback* bagi badan publik untuk evaluasi. (Oliver, 2004, pp. 34–35)

Model ini merupakan model yang paling representatif dan relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, model ini di desain agar keterbukaan terhadap publik dapat berfungsi dengan baik dengan distribusi informasi pihak internal hingga kepada masyarakat dan seluruh aktor terkait untuk dapat memahami kegiatan serta prosedur pemerintah, dan dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan serta partisipasi publik. Model ini membentuk rencana dan evaluasi keterbukaan informasi lebih jelas dan detail, sehingga penting untuk digunakan sebagai prinsip pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

HASIL DAN DISKUSI

Pembahasan ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian tentang keterbukaan informasi publik oleh Dinas Komunikasi Informatika dan

Statistik Kabupaten Bandung Barat. Adapun terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan agar transparansi dapat terlaksana untuk dapat mencapai keterbukaan informasi publik yang penulis tuliskan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Komitmen Kepemimpinan (*Leadership Commitment*)

Adanya transparansi dimulai dari dedikasi komitmen dari kepemimpinan organisasi, transparansi tidak hanya di implementasikan pada manajemen tingkat atas tapi dilakukan secara sistematis ke seluruh pegawai badan publik. Dalam mencapai komitmen kepemimpinan terdapat indikator-indikator yang harus dipenuhi, diantaranya ialah:

a. Standar Kepemimpinan

Pimpinan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat sudah memiliki standar kepemimpinan dengan arahan konsisten serta pengawasan yang inklusif terhadap karyawan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. Juga sudah adanya standar yang berlaku untuk mencapai tujuan diantaranya SOP (*Standard Operating Procedure*), visi dan misi, tujuan, strategi yang ingin dicapai, indikator kinerja utama, program keterbukaan informasi serta kegiatan yang dilakukan, juga peraturan-peraturan dari kebijakan yang mengatur.

b. Dokumentasi dan Komunikasi Organisasi

Berdasarkan hasil data, dokumentasi dan komunikasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat sudah dilakukan dengan baik. Dokumentasi secara sistematis pada organisasi dibutuhkan agar nilai transparansi tersebut tumbuh pada budaya organisasi, pelaporan transparansi secara rutin akan membentuk budaya dan pemantauan transparansi di masa depan, pelaporan dokumentasi yang tersusun juga dapat mempercepat proses kolaborasi antar bidang dan seksi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. Komunikasi yang intens antar karyawan pada organisasi juga perlu dilaksanakan untuk dapat mencapai transparansi. Aspek eksekusi perlu dilakukan secara spesifik, terperinci,

tertulis, dan dikomunikasikan secara luas, praktik transparansi yang meliputi pengumpulan, analisis, dan pelaporan metrik organisasi.

c. Koordinasi Organisasi

Koordinasi merupakan salah satu faktor yang menunjukkan komitmen kepemimpinan (*leadership commitment*), koordinasi yang didedikasikan untuk penegakan transparansi yang cepat dan kokoh sesuai pedoman etika. Berdasarkan data yang didapatkan, hubungan kerja dan kerjasama yang baik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat sudah dilakukan berkesinambungan baik secara vertikal antar pegawai ataupun secara horizontal oleh pimpinan kepada karyawan. Koordinasi antar seksi dan bidang dilakukan secara proaktif dalam melaksanakan program atau kegiatan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat.

2. Proses Formal (*Formalized processes*)

Proses formal merupakan cara efektif untuk mengetahui proses serta pencapaian keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. Transparansi sebagai proses yang harus terus menerus dilakukan, proses formal yang sudah terintegrasi akan membentuk sumber informasi yang sering, berkala, serta valid.

a. Mekanisme Proses

Mekanisme proses keterbukaan informasi publik sudah diatur pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa informasi dan dokumentasi publik di lingkungan pemerintahan daerah dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah. Kabupaten Bandung Barat juga sudah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai arahan mekanisme proses keterbukaan informasi publik. Namun pada pelaksanaannya berdasarkan data yang didapat, mekanisme serta sistematika keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bandung Barat masih belum berjalan seperti informasi berkala, informasi serta merta, serta PPID yang belum efektif karena

legalitas yang perlu diperbarui, tupoksi PPID yang seharusnya merupakan implementor keterbukaan informasi publik tidak terlaksana, padahal seluruh mekanisme proses keterbukaan informasi publik dari menyusun, melaksanakan kebijakan informasi, mengoordinasikan, mengonsolidasikan, pengumpulan bahan informasi, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik dan lainnya sebagai mekanisme proses merupakan tugas dan kewenangan yang wajib dilakukan oleh badan publik.

b. Penggunaan Website

Tautan *web* sebagai sistem yang berorientasi untuk transparansi merupakan bentuk proses formalisasi. Namun *website* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat saat ini masih belum efisien, informasi yang seharusnya diberikan belum tersedia dan belum sesuai dengan aturan yang berlaku, informasi publik masih sangat sedikit dan *website* pun tidak di-*update* secara berkala. *Website* yang belum dimanfaatkan dengan maksimal untuk keterbukaan informasi publik, *user experince* dan tampilan dari *website* pun tidak interaktif. Minimnya informasi serta tidak adanya *update* informasi yang wajib diberikan mulai dari Informasi Berkala, LLIP (Laporan Layanan Informasi Publik), SLIP (Standar Layanan Informasi Publik), Informasi Setiap Saat, dan Informasi Serta Merta dari *website* Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat, dan *website* Kabupaten Bandung Barat. *Website* Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat dan *website* Kabupaten Bandung Barat juga belum menyediakan layanan permintaan informasi secara *online*. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme proses pemanfaatan *website* sebagai wadah implementasi keterbukaan publik masih rendah.

c. Laporan Informasi Publik

Proses pelaporan rutin informasi kepada publik merupakan syarat fundamental dari transparansi, juga sebagai perwujudan dari kebijakan dalam rangka mencapai

keterbukaan informasi publik. Informasi publik diwajibkan untuk diberikan secara berkala sebagai pelaporan kepada publik, pelaporan tersebut juga sudah diatur oleh kebijakan terkait yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu badan publik wajib memberikan laporan terkait Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Laporan Layanan Informasi dan Informasi Serta Merta sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik. Namun, berdasarkan laporan hasil penilaian akhir monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi, Kabupaten Bandung Barat belum memberikan laporan layanan informasi publik (LLIP). Berdasarkan data yang didapat, Kabupaten Bandung belum memberikan laporan secara berkala yaitu laporan informasi berkala, informasi setiap saat, laporan layanan informasi dan informasi serta merta. Dalam realisasinya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat belum memahami urgensi pemberian laporan kepada publik sebagai transparansi sebagai indikator Proses Formal (*Formalized processes*) yang disampaikan oleh Richard W Oliver (2004).

3. Program Latihan (*Training Programs*)

Komitmen birokrasi dari *top-management* diimplementasikan dengan program pelatihan komprehensif yang memenuhi kebutuhan mereka sebagai langkah untuk membangun strategi manajemen sumber daya manusia. Program pelatihan yang dilakukan memiliki tujuan untuk membentuk badan publik yang dapat mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi yang sudah didekodekan, juga dapat diakses oleh seluruh audiens hingga audiens nonteknis.

a. Program Pelatihan

Menciptakan badan publik yang transparan membutuhkan gabungan dari sikap dan aspek-aspek penting yang mendorong keterbukaan informasi publik, aspek-aspek tersebut dapat dicapai dengan pelatihan yang canggih, program dan proses untuk melindungi intelijen kompetitif, dukungan terbuka bagi mereka yang menunjukkan integritas dan adanya kecaman bagi yang

tidak, juga komunikasi dua arah yang aktif. Berdasarkan data yang didapat, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat belum memiliki program pelatihan komprehensif pada keterbukaan informasi publik untuk melatih pegawai sebagai orientasi, keterampilan manajemen, dan keterampilan operasional karyawan.

b. Sumber Daya Manusia

Seluruh sumber daya manusia di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat merupakan seluruh pihak-pihak yang menjalankan keterbukaan informasi publik. Seluruh karyawan harus memiliki keterampilan dalam pengorganisasian dan pegangan etika agar transparansi dapat berjalan secara efektif. Sumber daya manusia yang ada merupakan hasil dari program pelatihan yang mempengaruhi pencapaian dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. Kualitas transparansi yang dimiliki Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat sebagai badan publik belum cukup dari segi kualitas ataupun kuantitas, seperti masih dibutuhkannya tenaga ahli bantuan *programmer* untuk dapat melakukan percepatan pengembangan aplikasi sebagai strategi kunci yang relevan terkait dengan pencapaian keterbukaan informasi kepada publik. Saat ini sudah terdapat 4 tenaga ahli *programmer* yang ditugaskan untuk membuat dan mengembangkan aplikasi, bukan hanya layanan publik tapi juga pengembangan administrasi pemerintahan untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

4. Komunikasi Dengan Stakeholder (*Communication with stakeholders*)

Aspek transparansi selanjutnya yang mempengaruhi keberhasilan keterbukaan informasi publik ialah komunikasi dengan *stakeholder* (*communication with stakeholders*). Transparansi mewajibkan proses yang aktif, seperti mengomunikasikan informasi dengan tepat waktu dan efisien, sehingga *feedback* yang didapatkan pun efektif.

a. Komunikasi Dengan Stakeholder terkait Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk dari pengelolaan komunikasi dengan publik, khususnya badan publik kepada masyarakat. Dibutuhkannya komunikasi yang sering kepada publik mengenai program ataupun kegiatan yang sedang dilakukan ataupun yang perlu dikerjakan untuk dapat mencapai tujuan keterbukaan informasi publik oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. Untuk dapat melakukan komunikasi dengan seluruh pihak dibutuhkannya pemahaman peran, dan tanggung jawab masing-masing, dibutuhkannya inisiatif dari seluruh pihak terkait. Komunikasi berupa pemberian pemahaman dari badan publik kepada masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik juga merupakan fundamental tercapainya transparansi. Dari hasil data yang didapat, penulis melihat bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat sudah mengetahui urgensi komunikasi dan melakukan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan juga koordinasi dengan masyarakat, media dan komunitas, namun pada pelaksanaannya belum mengarah kepada keterbukaan informasi publik dan belum menjaring secara keseluruhan masyarakat. komunikasi dari seluruh stakeholder belum berjalan dengan efektif, bahkan masih satu arah dan proses komunikasi masih direspon dengan lambat. Kurangnya komunikasi dapat menghambat proses kolaborasi yang dapat dilakukan di Kabupaten Bandung Barat.

b. Sosialisasi dan Partisipasi Keterbukaan Informasi Publik

Terdapat beberapa tahapan untuk dapat mencapai tujuan transparansi, tahap awal tersebut adalah sosialisasi dan partisipasi. Pemahaman tentang pentingnya keterbukaan informasi publik perlu diinformasikan kepada masyarakat agar masyarakat mau turut berpartisipasi pada informasi publik juga melaksanakan perannya sebagai fungsi pengawasan dan mencapai upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Dibutuhkan pertemuan pengajaran kepada seluruh aktor terkait sebagai *stakeholder* khususnya masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Sosialisasi merupakan bentuk komunikasi yang mengacu pada proses mempengaruhi publik untuk turut berpartisipasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data yang didapat, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi masih belum dilakukan dengan maksimal, hal tersebut sangat memengaruhi hasil partisipasi masyarakat yang belum antusias untuk turut berkoordinasi pada ketercapaian keterbukaan informasi publik, karena publik masih belum sadar dan mengetahui peran serta pentingnya transparansi. Penulis juga melihat bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat belum mengelola serta mengedukasi masyarakat baik melalui media *websites* ataupun secara langsung terkait sosialisasi keterbukaan informasi publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang sudah penulis uraikan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat belum berjalan dengan optimal dan belum sesuai dengan aspek-aspek transparansi. Hal tersebut dapat dilihat dari 4 dimensi untuk dapat tercapainya transparansi yaitu komitmen kepemimpinan (*Leadership commitment*), Proses formal (*Formalized processes*), Program latihan (*Training programs*), dan Komunikasi dengan seluruh aktor (*Communication with stakeholders*), hanya satu aspek yaitu komitmen kepemimpinan yang sudah berjalan dengan baik dan aspek lainnya belum diimplementasikan dengan baik. Belum baiknya pelaksanaan transparansi juga dapat dilihat dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang tidak sesuai dengan kebijakan yang mengatur dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ada.

Belum maksimalnya implementasi transparansi juga disebabkan oleh komitmen transparansi untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik tidak dibersamai dengan kerja nyata dalam proses pelaksanaan, lalu masih lemahnya pemahaman serta perencanaan untuk mencapai tujuan keterbukaan informasi publik sebagai timbal balik dari belum maksimalnya program pelatihan pada pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. Pemberian informasi

melalui media dan *website*, laporan yang berkala, serta monitoring sebagai fundamental pelaksanaan transparansi juga belum sesuai dengan target yang ditentukan. Hubungan komunikasi dan pelaksanaan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik yang belum baik juga berdampak pada partisipasi dan antusiasme publik yang kecil.

REFERENSI

BUKU

- Arikunto. (2019). Metodologi Penelitian, Suatu Pengantar Pendidikan. In *Rineka Cipta, Jakarta*.
- Babbie, E. (2014). The Basics of Social Research: Cengage Learning. In *Stamford, CT*.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). *English Language Teaching*.
- Gray, D. E. (2013). Doing Research in the REAL WORLD THIRD. In *Sage* (Issue January).
- Leftwich, A. (1993). Governance, democracy and development in the Third World. *Third World Quarterly*.
<https://doi.org/10.1080/01436599308420345>
- Oliver, R. (2004). *What is Transparency?* (1st Edition, Vol. 1). McGraw Hill Professional, 2004. <https://doi.org/10.1036/0071457224>
- Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2008). file:///C:/Users/Tiara/Downloads/Undang Undang No 14 Tahun 2008.pdf
- UNDP. (2011). Governance Principles, Institutional Capacity and Quality. In *Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty*.
- Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (5th ed.). In *Thousand Oaks, CA: SAGE Publications*.

JURNAL

- Ekinci, Y., & Riley, M. (1999). Measuring hotel quality: Back to basics. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 11(6).
<https://doi.org/10.1108/09596119910281775>
- Fukuyama, F. (2013). What is governance? In *Governance* (Vol. 26, Issue 3).
<https://doi.org/10.1111/gove.12035>
- Grimmelikhuijsen, S. G., & Welch, E. W. (2012). Developing and Testing a Theoretical Framework for Computer-Mediated

Transparency of Local Governments. *Public Administration Review*, 72(4).
<https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02532.x>

- Jashari, M. I. P. (2018). The Role of the Principle of Transparency and Accountability in Public Administration. *Acta Universitatis Danubius: Administratio*, 10(1).
- Johnston, M. (2002). Good governance: rule of law, transparency, and accountability. *Colgate University*.
- Meijer, A. (2009). Understanding modern transparency. *International Review of Administrative Sciences*, 75(2).
<https://doi.org/10.1177/0020852309104175>
- Sakapurnama, E., & Safitri, N. (2012). Good governance aspect in implementation of the transparency of public information law. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 19(1).
- Stoker, G. (1998). Governance as theory: five propositions. *International Social Science Journal*, 50(155). <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00106>
- Stone, C. N. (1991). THE HEDGEHOG, THE FOX, AND THE NEW URBAN POLITICS: Rejoinder to Kevin R. Cox. *Journal of Urban Affairs*, 13(3). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9906.1991.tb00256.x>
- Van de Walle, S., & Bouckaert, G. (2003). Public service performance and trust in government: The problem of causality. *International Journal of Public Administration*, 26(8-9).
<https://doi.org/10.1081/PAD-120019352>
- Worthy, B. (2010). More open but not more trusted? The effect of the freedom of information act 2000 on the United Kingdom central government. *Governance*, 23(4).
<https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2010.01498.x>

PENELITIAN LAIN

- Sjoraida, D. F. (2015). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Sosiohumaniora*, 17(3).
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8338>

DOKUMEN

- Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. (2020). Laporan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. *Laporan*, 109.
<http://komisiinformasi.jabarprov.go.id/wp->

content/uploads/2021/01/Laporan-Tahunan-2020.pdf

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. (2020).

Standard Operating Procedure (SOP) Prosedur

Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Bandung Barat. (n.d.).

Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.